

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah di Indonesia sejak 1 Januari 2001 mengalami perkembangan yang sangat berarti. UU No. 22 dan 25 tahun 1999 telah menjadi dasar yang kuat bagi Pemerintah Daerah untuk mencoba mandiri, khususnya dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam proses penyusunan anggaran daerah atau penganggaran daerah. Undang-undang tersebut kemudian direvisi dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah memunculkan jenis akuntabilitas baru, sesuai dengan UU 32 dan 33 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah.

Akuntabilitas ini terdapat dalam tiga jenis pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu (1) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan dekonsentrasi, (2) pertanggungjawaban pembiayaan pelaksanaan pembantuan, dan (3) desentralisasi (Sadjiarto, 2000). Sementara di tingkat pemerintah pusat, pertanggungjawaban keuangan tetap dalam bentuk pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)

Akuntabilitas publik telah menjadi tujuan terpenting dari reformasi sektor publik di berbagai negara, bukan hanya di negara berkembang saja namun negara yang

sudah maju sekalipun terus berusaha memperbaiki praktek akuntabilitas lembaga sektor publik (Mahmudi, 2002). Permasalahan akuntabilitas publik sangat kuat disuarakan sejak dilaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tersebut adalah untuk menciptakan *good governance*, yaitu pemerintahan yang baik, yang ditandai dengan adanya transparansi, akuntabilitas publik, partisipasi, efisiensi dan efektivitas, serta penegakan hukum (Mahmudi, 2002).

Informasi yang dihasilkan oleh teknologi informasi berguna untuk keperluan pribadi, bisnis, pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Kemajuan teknologi informasi menyebabkan makin beragamnya jenis kegiatan yang berbasis pada teknologi ini, seperti *e-government*, *e-commerce*, *e-education*, *e-medicine*, *e-laboratory*, dan lainnya yang keseluruhannya berbasis pada teknologi informasi.

Dalam rangka mewujudkan dan menciptakan *good governance*, dapat dilakukan dengan mewujudkan *e-government* yang baik dengan mengalihkan pelayanan kepada masyarakat menggunakan sistem teknologi informasi. Sistem informasi yang dihasilkan dari teknologi informasi telah merambah dan berkontribusi positif pada berbagai sektor, mulai dari sektor pemerintahan, sektor perekonomian, sektor industri, dan sektor pendidikan. Pemerintah Daerah sebagai unsur sektor publik menggunakan teknologi informasi untuk merespon perubahan dan sebagai alat bantu efisiensi dan efektivitas pengelolaannya. Kemajuan teknologi informasi bermanfaat dalam meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan akurat, sehingga akhirnya akan meningkatkan produktivitas. Teknologi informasi menggunakan seperangkat

komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan. Teknologi informasi merupakan teknologi yang membantu menghasilkan, memanipulasi, menyimpan, mengkomunikasikan, dan menyampaikan informasi (Suyanto, 2005).

Menurut Lucas dan Spittler (1999) agar teknologi informasi dapat dimanfaatkan secara efektif sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja, maka anggota dalam organisasi harus dapat menggunakan teknologi tersebut dengan baik. Oleh karena itu sangat penting bagi anggota organisasi untuk mengerti dan memprediksi kegunaan sistem tersebut. Terdapat tingkat pengambilan (*return*) investasi yang kecil jika anggota dalam organisasi gagal untuk menerima teknologi tersebut atau memanfaatkannya secara maksimal sesuai kapabilitasnya. Teknologi informasi yang memadai sangat mendukung proses pengembangan sistem informasi yang baik sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja pengguna sistem. Perkembangan teknologi informasi disatu sisi menguntungkan, tetapi disisi lain dapat menimbulkan beberapa masalah. Bahkan teknologi informasi merupakan salah satu penyebab adanya tekanan bisnis pada organisasi.

Seddon (1997) menyatakan bahwa penggunaan sistem informasi merupakan perilaku yang muncul akibat adanya keuntungan atas pemakaian sistem informasi tersebut. Perilaku yang ditimbulkan dari pemakaian sistem informasi ini dalam proses selanjutnya diharapkan akan memberi dampak terhadap kinerja individu.

Goodhue (1995) menyatakan bahwa keberhasilan sistem informasi suatu perusahaan tergantung bagaimana sistem itu dijalankan, kemudahan sistem itu bagi para pemakainya, dan pemanfaatan teknologi yang digunakan.

Akuntansi sebagai suatu sistem informasi, mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi ekonomik mengenai suatu badan usaha kepada berbagai pihak. Sistem informasi akuntansi berbasis komputer dirancang untuk mengubah data akuntansi menjadi informasi. Bisa juga merupakan sebuah rangkaian prosedur formal dimana data dikumpulkan dan diproses menjadi informasi, dan didistribusikan kepada para pemakai (Budiasih, 2002).

Implementasi sistem akuntansi yang digunakan bukan hanya merupakan tanggung jawab karyawan yang ada pada bagian tertentu, tetapi karyawan harus bertanggungjawab terhadap pengoperasian sistem. Pengoperasian sistem harus secara hati-hati dan selalu dilakukan supervisi atas sistem tersebut sebelum dioperasikan sepenuhnya. Oleh karena itu, sistem akuntansi harus dirancang untuk memenuhi spesifikasi informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dan memberikan kepuasan bagi penggunaannya, sehingga sistem akuntansi yang digunakan menjadi efektif.

Sebagaimana yang dikemukakan Gupta *et al.*, (2007) bahwa untuk mengetahui efektivitas sistem informasi maka yang dapat digunakan sebagai ukuran adalah kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna merupakan salah satu indikator keberhasilan pengembangan sistem informasi. Penelitian Gupta *et al* (2007) menemukan bukti empiris bahwa efektivitas sistem informasi pada organisasi ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kepuasan pengguna sistem informasi. Kepuasan pengguna sangat penting untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan ketelitian pembuatan laporan organisasi. Efektivitas sistem informasi organisasi secara positif dihubungkan dengan kepuasan pemakai.

Kepuasan pengguna akhir sistem informasi dapat digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu sistem informasi. Kepuasan pengguna akhir ini kemudian menjadi bagian dalam pengembangan model keberhasilan sistem informasi. Sistem informasi yang sesuai kebutuhan dan harapan pengguna adalah sistem informasi yang berkualitas, cepat dalam menampilkan informasi, aktual, dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan tepat dengan kebutuhan yang diinginkan. Untuk memenuhi kebutuhan akan sistem informasi yang baik diperlukan sistem perancangan yang baik, serta sistem pemrograman yang baik dan mampu memanjakan pengguna dengan memberikan dan mengembangkan berbagai fasilitas untuk mengakses informasi yang disediakan (Virra, 2014)

Penggunaan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan *e-government* telah dilakukan di Provinsi Lampung sejak tahun 2009 dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai software akuntansi dalam membantu pengelolaan dan pemrosesan keuangannya. Terkait dengan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 56 Tahun 2006 yang mengamanatkan bahwa daerah harus menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, kecermatan, ketepatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) merupakan seperangkat aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektifitas implementasi berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang didasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel dalam proses-proses yang terjadi

dalam pengelolaan keuangan daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang meliputi proses penganggaran, perencanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Aplikasi SIPKD ini diimplementasikan dengan harapan untuk menciptakan efektivitas kerja serta meningkatkan dalam mengelola keuangan daerah. Akan tetapi dalam penerapan software ini memerlukan biaya yang sangat besar sehingga perlu dikaji untuk mengetahui pengaruh penggunaan SIPKD terhadap efisiensi dan efektifitas kerja pengguna sistem informasi.

Berkaitan dengan penerapan Software Akuntansi SIPKD maka penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang pengaruh kepuasan pengguna sistem akuntansi tersebut terhadap efisiensi dan efektifitas kerja penggunanya. Dalam penerapannya, aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) ini dilakukan oleh operator-operator dari instansi pengguna keuangan daerah (SKPD).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan berbagai gejala-gejala permasalahan dalam latar belakang, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Apakah kepuasan pengguna software akuntansi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif terhadap Efisiensi kerja pengguna Sistem informasi;
2. Apakah kepuasan pengguna software akuntansi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) berpengaruh positif terhadap Efektivitas kerja pengguna sistem informasi.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk menganalisis secara empiris Pengaruh Tingkat Kepuasan Penggunaan Software Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Terhadap Efisiensi Dan Efektifitas Kerja Pengguna Sistem Informasi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis,

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dan menambah pengetahuan tentang pengaruh tingkat kepuasan pengguna terhadap efisiensi dan efektifitas kerja pengguna aplikasi sistem akuntansi instansi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi masukan dan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan tentang penerapan software sistem akuntansi instansi serta dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan penggunaan software sistem akuntansi instansi.